Acara pembukaan pertemuan IDEC - FAR EAST REGIONAL WORKING GROUP MEETING, Jakarta 19-22 Maret 2007.

Penyelenggaraan Pertemuan International Drug Enforcement Conference

Oleh : Brigjen Pol.Drs. Indradi Thanos

Perkembangan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba terus mengalami peningkatan dan semakin meluas, sehingga menjadi permasalahan negara-negara di seluruh dunia dan merupakan bahaya global yang mengacam kehidupan manusia. Di tingkat regional khususnya kawasan Timur Jauh selain penyelundupan dan peredaran Heroin dalam jumlah besar oleh kelompok West-African Syndicate, dalam beberapa tahun terakhir tercatat pengungkapan beberapa Mega Laboratorium Gelap Psikotropika dengan kapasitas produksi ribuan tablet "Ecstasy" (MDMA) dan ratusan kilogram "Shabu" (Metamphetamine).

Mengingat permasalahan Narkoba bersifat multidimensi dengan jaringan yang sangat luas dan berbeda di lebih dari satu negara, maka para pejabat penegak hukum dari berbagai negara menyadari perlunya saling kerjasama dalam upaya pemberantasannya. Salah satu wadah kerjasama tersebut adalah forum International Drug Enforcement Conference (IDEC), yang bertujuan untuk mempersatukan para pejabat penegak hukum di bidang Narkoba dari berbagai negara guna meningkatkan kemitraan dan menjalin komitmen bersama dalam memerangi perdagangan gelap Narkoba, pencucian uang dan penyimpangan bahan kimia (prekursor).

Sebagai pelaksanaan dari agenda program IDEC di Bali pada tanggal 11-15 September 2006, negara-negara yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kawasan Timur Jauh (IDEC - Far East Working Group) menyelengarakan pertemuan di Jakarta pada tanggal 20-21 Maret 2007. dengan tujuan untuk lebih saling mengenal contact person, berbagi pengalaman dan informasi, serta memperbaharui dan menetapkan Target-target Regional untuk dapat dilakukan investigasi bersama.

Pelaksanaan Pertemuan forum International Drug Enforcement Conference (IDEC), dilaksanakan di Ballroom A Hotel Shangrila Jakarta, selama tiga hari mulai dari tanggal 20-21 Maret 2007. Peserta pertemuan/ Working group dihadiri oleh 78 orang peserta, yang merupakan perwakilan dari 15 negara yang tergabung dalam IDEC - Far East Region, yaitu: Australia, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam dan USA (JITF-West dan DEA).

Hasil yang dapat dicapai dari pertemuan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut adalah lebih meningkatkan efektifitas pertukaran informasi antar negara, maka identitas, nomor telephone dan e-mail peserta yang sekaligus sebagai *contact person* dari negara masing-masing didatakan dan dicetak serta didistribusikan kepada seluruh peserta dengan tujuan untuk lebih saling mengenal satu sama lain dan sebagai pedoman dalam berkomunikasi dan berbagi informasi.

Dari pokok-pokok bahasan presentasi yang telah disampaikan oleh perwakilan dari beberapa Negara, antara lain dapat disimpulkan bahwa peredaran heroin dan kokain masih didominasi oleh kelompok "*West African Syndicate*" dan dari hasil investigasi yang dipaparkan oleh peserta meeting bahwa sindikat tersebut masih berlangsung dan dikendalikan oleh OC Frank, seperti di Thailan, Korea dan juga Indonesia yang baru-baru ini menangkap John Okorke. Produksi dan peredaran gelap Psikotropika sangat dominan di kawasan Timur Jauh, hal ini dibuktikan dari beberapa paparan Negara-negara peserta yang mampu menangkap dan membongkar sindikatnya dalam beberapa tahun terakhir dan juga melakukan penyitaan psikotropika dalam jumlah yang cukup besar seperti di wilayah Hong Kong SAR, Myanmar dan Indonesia. Saat ini penerapan IT dalam membongkar jaringan Narkoba menggunakan Notebook Dongle Analysis sudah sangat diperlukan melihat keberhasilannya selama ini seperti yang dipaparkan oleh JIACDOC. Peredaran gelap Narkoba semata-mata untuk tujuan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar, sehingga penting dan perlu ditekankan investigasi terhadapt asset dan aliran uang guna melakukan pengungkapan dan penyitaan.

Hasil Diskusi sepakat bahwa seluruh peserta pertemuan menegaskan kembali pentingnya peningkatan kerjasama di antara seluruh negara-negara anggota khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Seluruh peserta mempertimbangkan adanya the Centre for drug Information (CDI) sebagai salah satu model sistem pertukaram informasi di masa datang. Seluruh Peserta setuju untuk menampilkan seluruh dokumen yang telah disetujui oleh sidang pada pertemuan IDEC XXV di Madrid, Spanyol. Seluruh peserta setuju untuk mengangkat Pol. Maj. General Aditep Panjamanond, Deputy Commissioner Narcotics Suppression Bureau, Royal Thai Police, sebagai Ketua IDEC Far East Region Working Group yang baru.***

Profesi Kepolisian Harus Terbebas dari Pengaruh Maupun Interest Politik

Mencermati pandangan masyarakat terhadap institusi Polri, melalui berbagai uji pendapat, membuktikan bahwa perihal sosok diri Polri, terdapat pengakuan bahwa Polri telah berkembang semakin bersahabat dengan masyarakat, sekaligus pula tumbuh kepercayaan diri atas kedudukannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis kepada perlindungan hak sipil demikian antara lain amanat Koorsahli Kapolri pada upacara bulanan bertempat di lapangan Bhayangkara Jakarta. Pada kesempatan yang sama Koorsahli mengatakan bahwa Warga Negara. kita memahami, di tengah berbagai distorsi yang ada,antara kenyataan dan harapan yang melambung tinggi, tidaklah mudah bagi segenap insan Bhayangkara Negara yang tersebar di seluruh penjuru tanah air untuk mengemban tanggung jawab tesebut, guna memberikan hasil yang optimal di tengah berbagai kendala serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

Para pemimpin Polri patut menyampaikan terima kasih serta rasa bangga yang mendalam kepada seluruh insan Bhayangkara di seluruh pelosok persada, yang terus berjuang tanpa mengenal lelah, yang senantiasa memberikan Dharma Bhakti yang terbaik kepada Nusa dan Bangsa, sehingga kita semua berhasil melalui tahun yang lalu dengan segala suka dan duka yang ada. Bangsa dan Negara akan pengabdian Bhayangkara yang tak mengenal batas dan tak mengenal syarat kepada bumi pertiwi ini.

Secara umum, situasi Kamtibmas selama tahun 2006 dapat dikatakan cukup kondusif, sehingga memungkinkan berlangsungnya seluruh aktifitas masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jumlah kejahatan di tahun 2006 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Fenomena kejahatan konvensional yang paling menonjol adalah meningkatnya kejahatan pencurian, kejahatan perjudian berhasil ditekan demikian pula dengan kejahatan pencurian Ranmor.

Penanggulangan kejahatan trans nasional yang antara lain meliputi Narkoba dan terorisme menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan. Sedangkan kejahatan terhadap kekayaan Negara, Polri giat menangani kasus korupsi, kasus pembalakan liar, penambangan liar, pencurian sumber daya laut. Sedangkan menyangkut kejahatan yang berimplikasi kontijensi berupa kerusuhan massal terjadi di Tuban, Bangka, Papua, Belu dan Sikka dapat diatasi dengan baik oleh jajaran Polri di daerah.

Seluruh gambaran di atas menunjukkan cukup kondusifnya situasi yang berhasil diciptakan di tahun 2006 yang lalu, tak hanya data dan catatan tersebut saja yang dapat berbicara mengenai kinerja Polri dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat, namun hal ini juga dapat dilihat secara langsung di lapangan dari berbagai indikator yang ada.Antara lain, aktifitas sehari-hari masyarakat dapat berlangsung dengan dinamis, serta kegiatan pemerintah yang berjalan dengan lancar. Mengalirnya berbagai aktifitas tersebut mengindikasikan terbebasnya masyarakat dari rasa takut yang kerap kali menghambat dinamika masyarakat maupun roda pemerintahan.

Parameter lain dapat pula ditelusuri dari berbagai kegiatan

Prioritas sasaran yang ingin diraih 2007, diantaranya tertanggulanginya penanganan kejahatan di perairan Indonesia seprti illegal logging.

politik, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan yang berjalan dengan baik.Penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia di tahun 2006 dapat berlangsung dengan lancar, sekalipun ada satu daerah yang diwarnai dengan gangguan ketertiban dan keamanan. Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan maupun perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan lancar. Berbagai indikator ini, bermuara pada satu kesimpulan bahwa secara umum program dan kinerja Polri di tahun 2006 yang lalu dapat di rasakan manfaatkan oleh segenap masyarakat maupun pemerintah. Namun hal ini tentunya tidak boleh membuat kita cepat merasa puas. Banyak hal yang memang telah berhasil kita raih, namun tak sedikit yang masih perlu dipacu dan dibenahi.

Berdasarkan evaluasi situasi Kamtibmas tahun 2006 serta perkembangan lingkungan strategis baik global; regional dan nasional, maka Polri telah menetapkan prioritas sasaran yang ingin diraih pada tahun 2007. Diantaranya adalah tertanggulanginya penanganan kejahatan di perairan Indonesia. Demikian pula dengan terealisasinya pengembangan kekuatan, setidaknya berwujud pos Perpolisian Masyarakat, di pulau-pulau kecil terluar, dan terlaksananya operasionalisasi Perpolisian Masyarakat pada desa-desa yang menjadi prioritas.

Disamping itu, prioritas juga diberikan kepada penanganan kontijensi keamanan yang terjadi secara serentak dengan penggelaran kekuatan Brimob pada Polda-Polda tertentu.Prioritas juga dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan mengintensifikan razia pada tempat peredaran dan sumbernya. Penanganan Pilkada yang menjadi salah satu pilar demokrasi juga akan menjadi prioritas, demikian pula dengan penanganan perkara-perkara korupsi serta kejahatan lainnya yang merugikan kekayaan Negara.

Perlu kiranya kita ingat bersama, betapapun sempurnanya prioritas-prioritas yang dirancang, maka tak akan bermakna apa-apa, bila tanpa didukung dengan kesungguhan serta kebersamaan kita semua sebagai suatu teamwork.Tanpa rangkaian gerbong yang padu dan seirama dalam derap langkah, maka lokomotif terbaikpun tak akan mampu bergerak. Program-program prioritas yang telah dibentangkan tadi adalah merupakan jalur yang hendak kita tempuh bersama untuk membawa gerbong besar Polri melintasi tahun 2007 dengan kinerja yang optimal.

"Polri telah menetapkan prioritas sasaran yang ingin diraih pada tahun 2007. Diantaranya adalah tertanggulanginya penanganan kejahatan di perairan Indonesia."

Dalam kaitan melaksanakan apa yang kita prioritaskan, maka setiap insan Bhayangkara berkewajiban untuk menanggalkan budaya lama yang sarat dengan pendekatan represif serta arogansi kekuasaan, menggantinya dengan budaya baru yang lebih humanis. Hal yang harus selalu terpatri dalam benak kita adalah bahwa kita adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sebagai abdi yang baik, tentu kita harus menjunjung dan menghormati masyarakat, bukan sebaliknya. Masyarakat membutuhkan Polisi yang menyejukkan, yang menunjukkan mereka arah yang benar, sekaligus merupakan teman bicara dan tempat bersandar.

Perjalanan sejarah telah mematangkan Polri. Berbagai perubahan status dan format telah dialami dan dilalui, maka bila kembali terdengar berbagai gagasan yang hendak mereposisi kedudukan Polri, saya harap kita dapat menyikapinya dengan arif dan memandangnya sebagai bagian dari demokrasi yang hendak kita tumbuhkan bersama. Pertanyaan terpenting yang sebenarnya justru harus dijawab oleh seluruh komponen Bangsa adalah bagaimana menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai abdi Negara yang mandiri dan profesional, bukan di mana harus ditempatkan.

Menjadi Polisi sipil yang profesional bukanlah sekedar slogan yang menghiasi reformasi Polri, namun benar-benar harus menjadi roh yang menggerakkan seluruh personil Polri. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama setiap insan Bhayangkara untuk menjadikan spirit Polisi Sipil sebagai nafas yang mengiringi setiap derap langkah kita. Dengan demikian, betapapun melambungnya harapan yang digantungkan masyarakat terhadap performa Polri, kita tetap harus selalu berusaha untuk memanifestasikannya.

Dalam Negara yang demokratis profesi Kepolisian harus terbebas dari pengaruh maupun interest politik, serta menempatkan hukum serta keamanan masyarakat yang dilayani dan dilindungi sebagai panglima. Filosofi yang tertera dalam topi kebesaran kepolisian Negara Republik Indonesia.Rastra Sewakottama, yang berarti Abdi Utama dari Negara dan Bangsa, harus benar-benar dapat diwujudkan.***

Disarikan dari amanat Koorsahli Kapolri pada upacara bulanan yang bertempat di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri Jakarta.

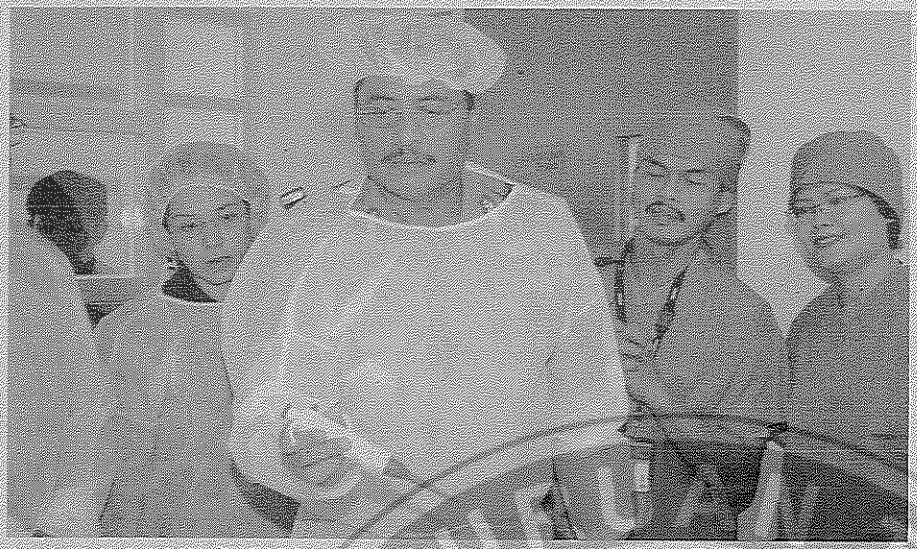

Usai peremian Laboratorium DNA Kapolri mengamati salah satu peralatan yang digunakan di laboratorium tersebut.

Wujudkan Polri yang Profesional dan Modern Melalui Upaya Modernisasi Sistem Maupun Peralatan

Dalam hal kejahatan Transional termasuk Terorisme terdapat beberapa prestasi Polri yang menonjol pada beberapa tahun terakhir. Pengungkapan beberapa kasus terorisme, mulai dari kasus Bom Bali 12 Oktober 2002, pemboman Hotel JW Marriot 5 Agustus 2003, ledakan Bom di depan Kedutaan Besar Australia 9 September 2004, Bom Bali II 1 Oktober 2005, penyergapan dan proses identifikasi Doktor Azahari 9 Nopember 2005, hingga penyergapan dan identifikasi tersangka teroris di Wonosobo 28 April 2006, demikian antara lain Release Kapolri pada acara peresmian Laboratorium DNA Pusdokkes Polri dan Sekretariat TIM DVI Nasional Indonesia tanggal 26 Maret 2007 di Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan keberhasilan identifikasi korban mati pada bencana massal (DVI), mulai dari identifikasi korban bom Bali tahun 2002, identifikasi pelaku teror pemboman Hotel JW Marriot, identifikasi 54 korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo tahun 2003, ledakan bom di depan Kedubes Australia, bom Bali II tahun 2005, identifikasi korban mati bencana gempa bumi di Yogyakarta, identifikasi korban jatuhnya pesawat Mandala di Medan, dan terakhir tenggelamnya KM Senopati di perairan Mandalika.

Semua prestasi di atas tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Kepolisian termasuk kedokteran dan terakhir tenggelamnya KM Senopati di perairan Mandalika. Prestasi di atas merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Kepolisian termasuk kedokteran dan kesehatan Polri dengan laboratorium DNA dan Tim DVI Nasionalnya. Beranjak dari berbagai pengalaman di atas Polri menganggap penting untuk mewujudkan Polri yang professional dan modern melalui upaya modernisasi sistem maupun peralatan dan mengikuti perkembangan dunia internasional dalam memerangi tindak kriminal yang semakin canggih.

Pembangunan Criminal DNA Data Base Indonesia merupakan perwujudan kerja sama internasional yang menggunakan teknologi DNA untuk penyidikan dan penegakan hukum, sesuai dengan Resolusi No. 8 pada Sidang Umum Interpol ICPO Ke 67 di Cairo Tahun 1998 dan Sidang Umum Interpol - ICPO Ke 57 di Rio Janeiro Brazil tahun 2006.

Dengan keberadaan laboratorium DNA ini, maka pembangunan criminal DNA data base di Indonesia dapat dilaksanakan dimulai dengan pendataan profil DNA dari pelaku kejahatan Terorisme, Narkoba, dan Kejahatan Pidana Umum lainnya yang menonjol.

Di samping untuk kepentingan di atas, Laboratorium DNA dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya seperti identifikasi, penelitian profil suku atau ras, penentuan garis keturunan (Paternitas), pemeriksaan penyakit tertentu (misalnya Flu Burung, Hepatitis), dan lain-lain.

DVI (Disaster Victim Identification)

Bencana dapat terjadi secara alami seperti pada bencana Tsunami, gempa bumi, banjir, ataupun akibat perbuatan manusia seperti pada kasus terorisme, yang dapat menimbulkan korban manusia baik korban hidup maupun mati.

Pada bencana akibat tindakan terorisme yang menimbulkan korban mati diperlukan identitas korban untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan penyidikan di mana terdapat kemungkinan ditemukannya korban yang merupakan tersangka pelaku. Sedangkan pada bencana lainnya khususnya pada bencana dengan korban massal, diperlukan identitas korban untuk kepentingan hak azasi korban sebagai manusia maupun kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Sesuai dengan Resolusi Interpol No. AGN/65/RES/13, tiap negara perlu membentuk Tim DVI, Tim DVI Nasional Indonesia, telah terbukti, memiliki peranan penting dalam proses identifikasi korban massal melalui berbagai tahapan ilmiah sesuai dengan prosedur Internasional (DVI-Interpol) dan Indonesia (Polri) sebagai salah satu anggota Interpol telah mendapat pengakuan Internasional di bidang DVI pada pertemuan tahunan Interpol di Lyon tahun 2006 sebagai negara yang memiliki kemampuan DVI setara dengan negara maju seperti Australia, Inggris dan , Jerman,

Disarikan dari Bahan Kapolri Pada Acara Press Release Peresmian Laboratorium DNA Pusdokkes Polri dan Sekretariat Tim DVI Nasional Indonesia

Penandatanganan serah terima jabatan Wakapolri dari Komjen Pol. Drs. Adang Daradjatun kepada Komjen Pol. Drs.Makbul Padmanegara disaksikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto di Rupattama, Mabes Polri.

Wujudkan Segera Polisi Sipil yang Bermoral, Profesional, Modern Serta Dekat Dengan Masyarakat

Manusia merupakan mahluk sosial. Dalam perkembangan kehidupan yang semakin kompleks, manusia menyadari bahwa ia tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai sesuatu. Kesadaran tersebut, mendorong manusia, untuk membentuk kelompok dan bekerja sama, hingga pada kondisi sekarang ini, manusia dan organisasi, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, demikian antara lain sambutan Kapolri pada acara serah terima jabatan Wakapolri di Rupattama.

Lebih jauh Kapolri; mengatakan perspektif terhadap adanya kesatuan dua variable, yaitu manusia dan organisasi ini, dalam lingkup organisasi Polri. Kita semua tentu mengetahui, bahwa di dalam organisasi Polri yang besar dan kompleks, permasalahan manusia dan organisasi, tidak akan pernah berhenti, karena permasalahan tersebut, akan tumbuh bersama perkembangan lingkungan, keterbatasan manusia, dan sumber daya lainnya yang ada. Oleh karena itu, kajian dan penanganan oleh Polri terhadap dua hal inipun, juga tidak akan pernah berhenti, karena secara ideal, kita menuntut suatu kesempurnaan, dalam pencapaian cita-cita, dimana cita-cita tersebut telah dirumuskan secara rasional, dalam visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berkaitan dengan kajian, dan penanganan terhadap manusia dan organisasi Polri ini, hal yang perlu kita pahami bersama adalah, bahwa di dalam menghasilkan kinerja (Performance) organisasi manusia, manusia Polri dan organisasi Polri, akan selalu berinteraksi, dan pola interaksinya bersifat timbal balik, dimana perilaku anggota akan mempengaruhi organisasi, dan organisasi akan menpengaruhi perilaku anggota. Menguraikan pernyataan tersebut, lebih dalam lagi dapat kita amati, bagaimana perilaku-perilaku (tindakan nyata, lisan, tulisan) seluruh anggota Polri dalam bekerja, baik dibidang operasional maupun bidang pembinaan, telah menghasilkan bentuk nyata organisasi, yang keberadaannya dapat dirasakan, baik oleh masyarakat maupun oleh anggota Polri sendiri. Demikian pula sebaliknya, segala aspek organisasi yang telah digariskan, meliputi doktrin, sistem, prosedur, etika profesi, norma hukum yang berlaku, pola manajemen, format kepemimpinan, budaya organisasi dan lain sebagainya, telah membatasi, mengatur, mengikat dan memaksa perilaku-perilaku anggota Polri, dalam bekerja di dalam organisasi.

Memahami tentang apa yang disampaikan Kapolri tersebut di atas, ada satu kata kunci yang dapat kita tangkap, yaitu pentingnya faktor manusia Polri dan perilakunya didalam organisasi, sehingga merupakan suatu konsekuensi logis, eksistensi kita akan hilang secara pasti, baik cepat ataupun lambat, bila dalam menjalankan organisasi Polri ini, kita tidak respektif terhadap faktor manusia.

Pada konteks ini, Kapolri mengingatkan, bahwa manusia di dalam organisasi merupakan faktor yang sangat unik, artinya, kita tidak bisa melakukan pendekatan hanya dalam satu dimensi saja. Beberapa pandangan menunjukkan, bahwa faktor manusia memerlukan pendekatan multi dimensi, yang harus didukung dengan suatu sistem yang menyeluruh, dan melibatkan berbagai pihak.

Perlunya pembenahan perilaku manusia didalam organisasi Polri, seperti yang telah saya uraikan di atas, merupakan suatu langkah yang sejalan dengan visi Polri, yang menginginkan "Terwujudnya postur Polri yang bermoral, profesional dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya, dalam memelihara Kamtibmas, dan menegakkan hukum".

Mengingat tolak ukur utama keberhasilan tercapainya visi ini, terletak pada perilaku yang di tampilkan anggota, di dalam mengawaki organisasi Polri, maka untuk mewujudkan visi tersebut, memang tidaklah mudah. Ber-

bagai upaya, strategi dan program, telah banyak dilaksanakan, dan sampai saat ini, telah membawa pada perkembangan yang progresif, namun Kapolri menyampaikan, bahwa apa yang telah dilakukan tersebut, belumlah memenuhi harapan kita semua. Berbagai analisa dan evaluasi terhadap proses pelaksanaannya, telah menemukan permasalahan dan ini memerlukan solusi terbaik, untuk segera diterapkan, di dalam pelaksanaan rencana-rencana kedepan yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, sebagai pimpinan Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dengan segala keterbatasan yang ada, tanpa dukungan pihak lain, terutama seluruh anggota Polri, tidak akan memberikan arti yang banyak, pada pencapaian arah dan tujuan yang dikehendaki.

Menyadari hal tersebut, kita patut merasa bangga, karena Polri pada hari ini telah menunjuk Komjen Pol Drs. R. Makbul Padmanagara, sebagai Waka Polri, menggantikan Komjen Pol Drs. Adang Daradjatun, yang selama ini mendampingi Kapolri. Serah terima jabatan diantara dua putra terbaik Polri, yang saat ini dilaksanakan, semakin menguatkan diri dan keyakinan, bahwa Polri kedepan akan semakin baik lagi.

Kepada Komjen Pol Drs. R. Makbul Padmanagara, bekerjasama dengan Jenderal merupakan suatu hal yang tak asing lagi. Segala dukungan dan pengorbanan, yang telah diberikan selama ini kepada Polri, diyakini akan dapat saling isi mengisi dan dapat ditingkatkan, sehingga akan memberikan hasil yang akan semakin baik.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, sebagai suatu pedoman untuk ditindaklanjuti :

1. Lakukan pengkajian dan perbaikan secara terus menerus, terhadap segala sistem, yang berlaku didalam organisasi kita. Saya mengharapkan sistem-sistem yang diberlakukan, menjadi suatu Great System yang terpadu, dapat menghasilkan kinerja Polri yang baik dan mampu mendeteksi serta meminimalisasi segala penyimpangan yang terjadi, didalam organisasi.
2. Kembangkan langkah-langkah yang nyata, bagi upaya Polri mewujudkan Polisi Sipil, yang bermoral, profesional, modern serta dekat dengan masyarakat.
3. Peliharalah harmonisasi setiap badan, yang mendukung bergeraknya organisasi Polri, utamanya badan di dalam organisasi Polri, yang berada pada fungsi pembinaan maupun operasional.

"Terwujudnya postur Polri yang bermoral, profesional dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya, dalam memelihara Kamtibmas, dan menegakkan hukum"

4. Lakukan pengawasan pada setiap sektor - sektor pelayanan, dilingkungan organisasi Polri. Tumbuhkan Kesadaran kolektif pada seluruh anggota, untuk mematuhi peraturan yang terkait, di dalam penyelenggaraan pelayanan, persyaratan yang diminta dan biaya yang dibutuhkan.
5. Pantau perkembangan strategi Perpolisian masyarakat/Polmas (*community policing*), yang saat ini telah kita terapkan. Yakinkan bahwa, strategi ini dapat dijalankan oleh setiap satuan - satuan Kepolisian terdepan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya sangat mengharapkan, Polmas dapat operasional, dalam meniadakan permasalahan - permasalahan sosial, yang berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas, menghapus ketakutan masyarakat terhadap kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta dapat menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat kepada hukum.
6. Lakukan pengawasan pada pemeliharaan, pembinaan dan pengunaan sumber daya organisasi. Keterbatasan sumber daya organisasi yang ada, mengharuskan kita untuk menghitung. Dan mempergunakannya secara efektif dan efesien (tidak boros atau tidak memberikan peluang bagi mark up berbelanja perlengkapan atau peralatan).

Sebelum mengakhiri sambutannya Kapolri menyampaikan ada beberapa persoalan krusial, yang masih menjadi beban pikiran kita diantaranya, tingkat kesejahteraan anggota yang masih rendah, terbatasnya anggaran operasional Polri, kualitas anggota yang masih belum memadai, perlengkapan operasional yang tidak mencukupi dan bahkan ada beberapa yang telah "Kadaluarsa (*Outdated*)", dan lain sebagainya. Dalam menghadapi persoalan ini, berikan potensi yang tebaik agar organisasi Polri tetap dapat melaksanakan tugas -tugasnya secara optimal. Ketahuilah, bahwa berbagai upaya yang masih terus dijalankan, adalah pengajuan perbaikan gaji anggota POLRI/PNS, usulan penembahan anggaran operasional, dan lain sebagainya.***

Disarikan dari sambutan Kapolri pada acara Serah terima jabatan Wakapolri di Rupattama - Jakarta.

Tegakkan Hukum Secara Transparan, Akutabel, Proporsional dan Profesional Demi Terwujudnya Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat

Serah terima jabatan Kababinkam Polri.

Situasi dan kondisi global, regional, nasional dan lokal selalu berubah dan bergerak saling mempengaruhi, yang dinamikanya mengimbas pada lahirnya tatanan tugas bagi Polri, yang semakin berat dan kompleks, demikian antara lain sambutan Kapolri pada acara serah terima Kabareskrim Polri, Kababinkam Polri dan para Kapolda.

Kapolri lebih lanjut mengatakan kita tentu masih ingat bagaimana ide perubahan di Negara kita, atau yang kita kenal dengan reformasi mulai diteriakkan oleh masyarakat. Berbagai sendi kehidupan yang dulunya dianggap tidak membawa kebaikan dan kesejahteraan, mulai disorot secara tajam untuk diganti dengan konsep pola dan sistem yang membawa kebaikan dana peningkatan bagi kualitas hidup. Disamping itu perubahan yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sedang berlangsung. Perubahan ini juga menciptakan kejahatan berdimensi baru yang cenderung canggih dan bervariasi serta sulit pembuktiannya.

Memahami tentang adanya perubahan tersebut kita dapat menyimpulkan, bahwa organisasi Polri tidak akan pernah berada/bekerja di dalam lingkungan yang vakum dan statis, selain itu perubahan di dalam kehidupan masyarakat ini, tidak akan pernah berhenti. Perubahan tersebut akan selalu terjadi dan pasti terjadi, seiring dengan adanya wawasan dan penemuan-penemuan baru tentang sesuatu hal, keinginan-keinginan manusia yang semakin berkembang serta tingkat kepuasan manusia yang tidak pernah terpenuhi. Menghadapi hadirnya perubahan tersebut, Polri perlu menumbuhkan kepekaan terhadap adanya perubahan, agar mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, karena bila tidak ada perubahan tersebut akan meniadakan eksistensi Polri di dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu hal yang paling tepat untuk kita lakukan adalah kita harus berada di atas, dan menguasai perubahan tersebut. Mengenali organisasi secara mendalam dan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai serta mengenali lingkungan sekitar kita adalah salah satu cara agar perubahan dapat berdampak positif terhadap kehidupan kita, dengan demikian maka kita mendapat ide-ide cemerlang untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada.

Salah satu perubahan utama yang saat ini sedang sama-sama kita lakukan adalah menggeser paradigma lama yang cenderung kaku, arogan, tertutup dan jauh dari masyarakat, menuju paradigma baru Polisi yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, transparan, akuntabel dan dekat dengan masyarakat.

Pada posisi pergeseran ini, belajar memahami, menerima dan melaksanakan hal-hal baru jelas memerlukan waktu, karena tidaklah mudah untuk merubah dan menanggalkan pola-pola lama yang cenderung nyaman, aman dan sudah menjadi kebiasaan. Lahirnya "mental block" (ketidak mauan membuka hati/pikiran) pada sebagian dari kita dikarenakan "belief sistem" (sistem kepercayaan) di dalam "in mind" (pikiran) kita, menganggap bahwa kebiasaaan-kebiasaan lama yang berlangsung selama ini, adalah sesuatu yang benar, sehingga terjadi apa yang dinamakan kebekuan paradigma, yang jatuh kedalam "tunnel vision" (pandangan yang sempit), dan cenderung menolak setiap perubahan yang terjadi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebekuan paradigma ini, tahapan yang perlu dilakukan adalah meyakinkan pada seluruh komponen organisasi bahwa perubahan organisasi itu penting. Dengan menyampaikannya melaluyi berbagai fakta dan data tentang adanya "gap" antara kinerja organisasi dengan masyarakat, yang semakin jauh dan mengkhawatirkan. Kemudian dilanjutkan dengan merancang dan melaksanakan perubahan yang dialakukan berdasarkan analisa yang mendalam sehingga perubahan yang dijalankan tidak "kontra produktif" tetapi benar-bener mengarah pada perbaikan organisasi, selanjutnuya perubahan yang dilakukan tersebut perlu diperkuat agar berkesinambungan.

Selain itu yang lebih penting lagi adalah menanamkan komitmen dan konsistensi pada diri kita masing-masing untuk mau berubah. Berubah untuk mau menjadi baik dengan kualitas yang terbaik, komitmen ini perlu disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, agar menjadi komitmen kita semua, seluruh anggota Polri, sehingg Polri menjadi institusi yang dapat dijadikan tolok ukur bagi komitmen masyarakat, Bangsa dan Negara ini untuk mau berubah dan berkarya.

Pada bagian lain Kapolri optimis bahwa hal-hal yang ingin dicapai dari adanya perubahan organisasi menuju

perbaikan tersebut akan dapat diwujudkan utamanya dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Kooptimisan tersebut bukan tanpa alasan yang jelas melainkan lahir dari kepercayaan dan keyakinan bahwa pejabat yang menerima jabatan baru merupakan insan-insan Polri yang dapat diandalkan sebagai "agent of change/ agen perubahan" yang mampu menularkan angin perubahan ke setiap lini organisasi Polri.

Kapolri juga mengingatkan jabatan tersebut merupakan posisi pada tataran pimpinan Polri. Pada posisi tersebut merupakan satu peluang yang besar untuk membuktikan bahwa pejabat tersebut memang pantas dan mampu untuk menduduki jabatan tersebut. Berikan perubahan yang sangat siginifikan bagi kemajuan Polri.

Selain itu pada posisi di tataran pimpinan ini, niat baik dan keikhlasan dan ketulusan hati dalam bekerja dan berkarya perlu ditumbuhkan. Hal ini yang merupakan modal utama yang dapat memotivasi dan sekaligus membenahi Polri yang kita cintai ini. Tanpa modal tersebut pejabat tersebut akan masuk pada lingkaran perhitungan untung dan rugi yang menonjolkan kepentingan diri sendiri dan cenderung bersifat indiviudualistis. Pahami bahwa kebaikan yang kita tanamkan maka kebaikan pula yang kita terima. Bila hari ini kita menanam kebaikan tersebut maka insya Allah kebaikan pula yang akan kita terima pada hari esok. Namun seandainya kita mungkin tidak merasakan kebaikan tersebut secara langsung kita harus yakin dan percaya bahwa ke depan, anak, cucu dan generasi penerus kita akan merasakan kebaikan tersebut.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai berikut :

Kepada Kabareskrim Polri yang baru; Komjenm Pol Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM :

1. Guna mengemban tugas yang bersifat repressif diperlukan ketegasan dan keberanian menolak intervensi, yang menyimpang terhadap kewenangan yang diberikan. Harus berani menegakkan hukum secara transparan, akutabel, proporsional dan professional demi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Lakukan transparasi proses penyidikan yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan terutama untuk mencegah adanya pandangan tentang keberpihakan penyidik dalam menangani suatu perkara.
3. Identifikasi titik-titik rawan terjadinya penyimpangan pada proses penyidikan, terutama hal-hal yang menyangkut teknis penyidikan.
4. Lakukan pembinaan fungsi Reserse pada satuan bawah dan tindak lanjuti komplain masyarakat dalam bentuk bantuan teknis, pengambil alihan penyidikan, jalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh anggota Communiti CJS (Criminal Justice System) dan lakukan koordinasi sejak awal proses penyidikan, sehingga kemungkinan bolak-balik perkara dapat diminimalisasi.

Kepada Kababinkan Polri yang baru Komjen Pol. Drs, Iman Haryatna.

1. Lakukan pembinaan pada satuan fungsi Binkam, untuk memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Ingatkan selalu anggota bahwa performance Polisi beseragam akan lebih mudah dinilai oleh masyarakat.
2. Bangun profesionalisme dengan mengadakan latihan secara berlanjut dan bertingkat serta binalah kedisiplinan anggota secara konsisten.
3. Lakukan pengecekan Alut dan Alsus secara berkala, tingkatkan pemeliharaan materil logistik sesuai ketentuan. Siagakan sepertiga kekuatan untuk sewaktu-waktu menghadapi kontijensi atau tugas-tugas lain dimana unsur Polisi berseragam diperlukan kehadirannya.

Kepada para Kapolda yang baru Irjen Pol Drs. Nurdin Usman (Kapolda Sumut), Irjen Pol Drs. Ito Sumardi Djuni (Kapolda Sumsel) Brigjen Pol Drs. Sitjiptadi, MM (Kapolda Riau) dan Brigjen Pol Drs. R. Anggoro Rahardjo Harry Anwar (Kapolda DIY).

1. Berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban Kapolda harus benar-benar menguasai karakteristik daerah, tempat dimana bertugas. Kecermatan dalam menerapkan gaya Kepolisian yang berorienteasi pada warna lokal (local colour policing) sangat dituntut disini. Perhatikan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang saat ini sedang kita laksanakan. Ketahuilah bahwa landasan utama yang ditekankan dalam Polmas ini adalah terwujudnya hubungan baik dan tulus antara Polisi dengan warga masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta dapat terwujudnya masyarakat yang taat dan patuh hukum.
2. Dalam menghadapi dinamika politik di daerah diperlukan wawasan dalam mengikuti perkembangan politik yang terjadi tetapi tidak bermain politik. Hal ini dimaksudkan untuk memprediksi potensi ancaman yang muncul dan dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.
3. Dalam penegakan hukum tindak tegas para pelaku tindak pidana yang merugikan kekayaan negara dan meresahkan masyarakat. Lakukan tindakan hukum secara proporsional dan professional, transparan, akuntabel guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
4. Dalam bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, wujudkan perilaku anggota yang dapat menciptakan perasaan tenteram damai dan terlindungi. Lakukan pengawasan yang ketat kepada satuan fungsi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, wujudkan sistem birokrasi Polri yang tidak berbelit-belit dan cenderung mempersulit kepentingan masyarakat.
5. Lakukan pengendalian dan pengawasan pada setiap kegiatan operasional Kepolisian. Dalam hal ini Kapolda tidak hanya "pandai berbicara dibelakang meja" tetapi mau turun ke bawah memotivasi anggota dan melakukan analisa melalui pengamatan langsung dilapangan.

Sebelum mengahiri sambutannya Kapolri mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama, atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Kiprah semangat dan kerja keras yang telah diberikan selama bertugas akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan merupakan sebagai suatu inspirasi yang akan memompa semangat dan kinerja yang di tinggalkan untuk terus bekerja dan berkarya.***

Disarikan dari sambutan Kapolri pada acara serah terima jabatan Kabareskrim Polri, Kababinkam Polri dan para Kapolda.

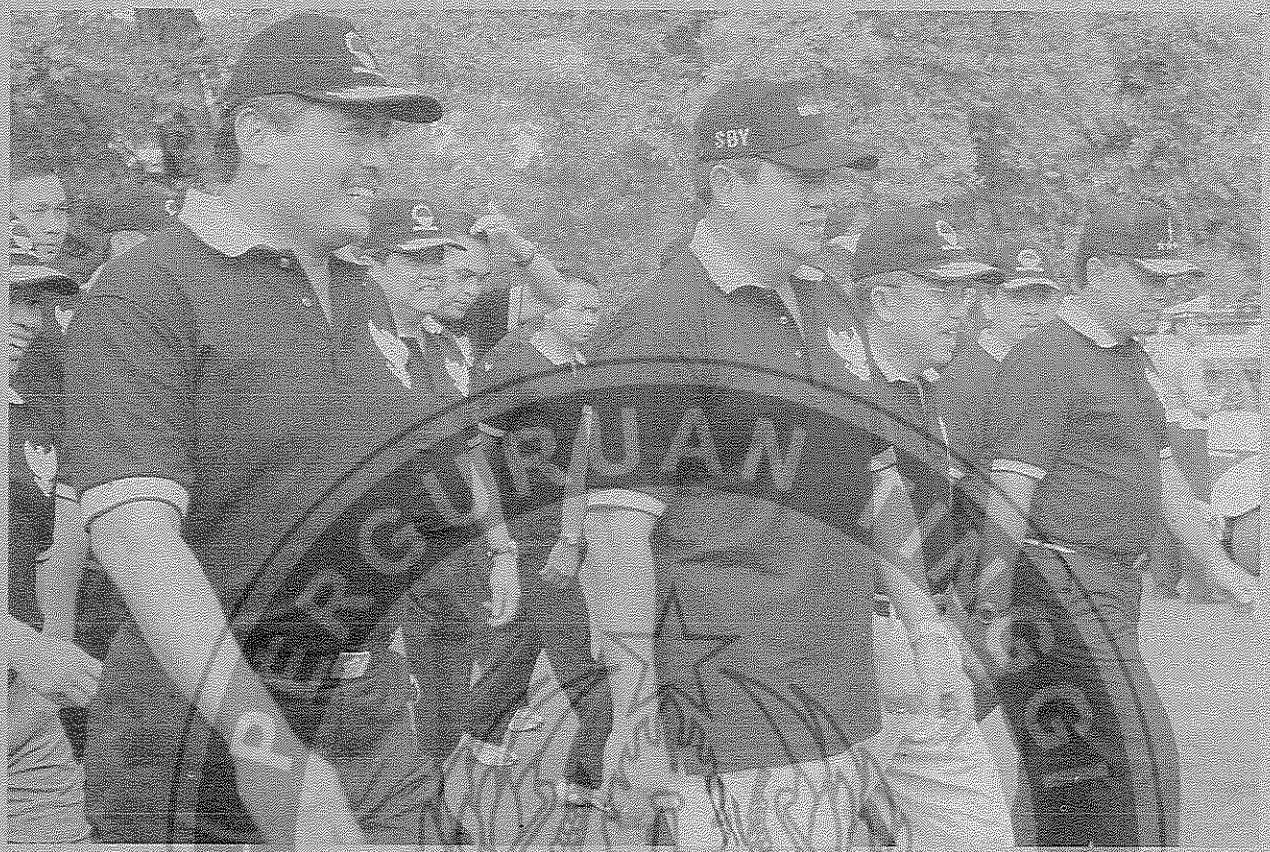

"Kebersamaan Kami Untukmu Indonesiaku"

TNI dan Polri adalah pilar kesatuan dan persatuan Bangsa. Keberadaan TNI dan Polri hukumnya wajib. NKRI akan tetap ada jika TNI Polri solid. Jum'at pagi medio Maret 2007 lalu di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, dilaksanakan olah raga santai yang melibatkan jajaran TNI dan Polri. Dengan kibasan bendera start, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla, melepas peserta gerak jalan dan lari santai bersama anggota TNI dan Polri. Olah raga santai ini diikuti oleh sekitar 5000 peserta, mulai dari Pati hingga Prajurit berpangkat rendah. Semua berbaur dengan suasana keakraban, untuk mempererat hubungan silaturahmi Prajurti TNI dan Polri. Usai mengibaskan bendera start, Presiden dan Wapres segera bergabung dengan peserta lain, berjalan mengikuti route sepanjang 3 KM yang ditempuh selama sekitar satu jam. Olah raga santai ini bertemakan "Kebersamaan kami untukmu Indonesiaku". Setelah mencapai garis finish Presiden dan Wapres segera menuju lapangan Upacara Bumi Perkemahan Cibubur, untuk beristirahat serta sarapan pagi bersama Prajurit.

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri M. Ma'ruf, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Seskab Sudi Silalahi, Panglima TNI Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Sutanto, KASAD Jenderal TNI Djoko Sutanto, KASAL Laksamana TNI Slamet Soebiyanto, KASAU Marsekal TNI Herman Prayitno, Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafri Sjamsuddin serta seluruh jajaran TNI/Polri.***

Penerangan Satuan Melalui Sosialisasi Fungsi Kehumasan

Sejak era reformasi Pers benar-benar bebas untuk mem-beritakan sesuatu yang dianggap menarik bagi mereka, pers benar-benar bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan, sehingga bermunculan berita/topik sensasional dan cenderung berisi fitnah, dusta, sadis untuk kepentingan bisnis dan seolah-olah tidak peduli dengan kode etik jurnalistik.

Polri sebagai institusi Negara, dalam mengemban fungsinya senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah yang fenomental, sehingga suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap posisi Polri menjadi sasaran bidik sebagai sumber informasi utama bagi media Pers, mengingat nilai produknya memiliki rating yang tinggi dikalangan media cetak/radio dan elektronik diselaraskan dengan gaya serta kemasan pengelolanya, sehingga dapat berimplikasi positif atau negatif terhadap Polri.

Divisi Humas Polri adalah bagian dari organisasi Polri yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi Humas/Public Relation dalam upaya membangun opini positif terhadap kinerja Polri, sebagaimana tertuang dalam visi Humas Polri, yaitu : "Membangun opini positif masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum yang profesional, serta dapat dipercaya melalui pengelolaan dan diseminasi informasi" tentu akan selalu berhubungan dengan media Pers.

Demi tercapainya tugas yang diemban Divisi Humas Polri sampai ke wilayah, maka Kadivhumas Polri bersama beberapa angota Kabid dan staf Divisi Humas Polri melaksanakan pembinaan dan sosialisasi fungsi kehumasan ke seluruh wilayah jajaran Polri, yang telah dilaksanakan adalah : Polda Sumut, Polda Sulsel, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jatim dan Polda Banten.

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi fungsi Humas di beberapa wilayah, pada intinya, Kadivhumas menyampaikan dan menekankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pentingnya pemahaman terhadap berbagai ketentuan dan perundang-undangan serta kebijakan pimpinan Polri mengenai tugas dan peran media Pers dalam meliput aktivitas tugas kepolisian, khususnya hal-hal yang tidak layak/dilarang diexpose.
2. Prinsip "bad news is good news" dalam pemberitaan media pers, perlu disikapi dengan kehati-hatian dan penguasaan materi dalam melibatkan liputan Pers terhadap aktivitas Kepolisian terutama masalah taktis dan teknis jangan dijelaskan dan diperlihatkan secara detail.
3. Mutu Sumber Daya Manusia yang mengawaki bidang Humas masih rendah dan pada sisi lain struktur kelembagaan Humas Polri keberadaanya hanya sampai ditingkat Polda, sehingga dipandang perlu kepada setiap pejabat fungsional Polri dapat berperan sebagai pengemban fungsi kehumasan.
4. Beberapa kinerja Polri yang perlu dipahami oleh segenap kesatuan kewilayahan, antara lain :

   a. Penanganan kelompok kriminal bersenjata Poso, ditandai penindakan hukum dengan tegas, dengan peyerbuan lokasi tempat berkumpulnya DPO dan penyimpanan senjata/bom di jalan pulau Jawa No. 2 Poso pada tanggal 11 dan 22 Januari 2007, hal ini terbukti dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Poso dengan tertangkapnya beberapa DPO, disita berbagai peralatan Senpi (standard dan rakitan), bahan peledak/bom amunisi maupun senjata tajam, ditemukannya bunker tempat perakitan Senpi/bom dan amunisi serta terungkapnya jaringan ekstrimis/latent radikal yang mengatasnamakan agama yang selama ini memprovokasi masyarakat melakukan berbagai tindak kejahatan.
   b. Konsep Kamnas dan RUU Kamnas jelas menyimpang dari arah reformasi, sehingga Polri tidak sependapat untuk di kembangkan atau menolak, karena pada hakekatnya berusaha mengembalikan paradigma lama dengan menyatukan pertahanan dan keamanan. Konsep tersebut telah mencampur adukan aspek pertahanan dan keamanan sebagai unsur paduan Hankam, sehingga benar-benar tidak sesuai dengan arah reformasi.
5. Hak pilih anggota Kepolisian dalam Pemilu, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri tidak menggunakan hak pilihnya.

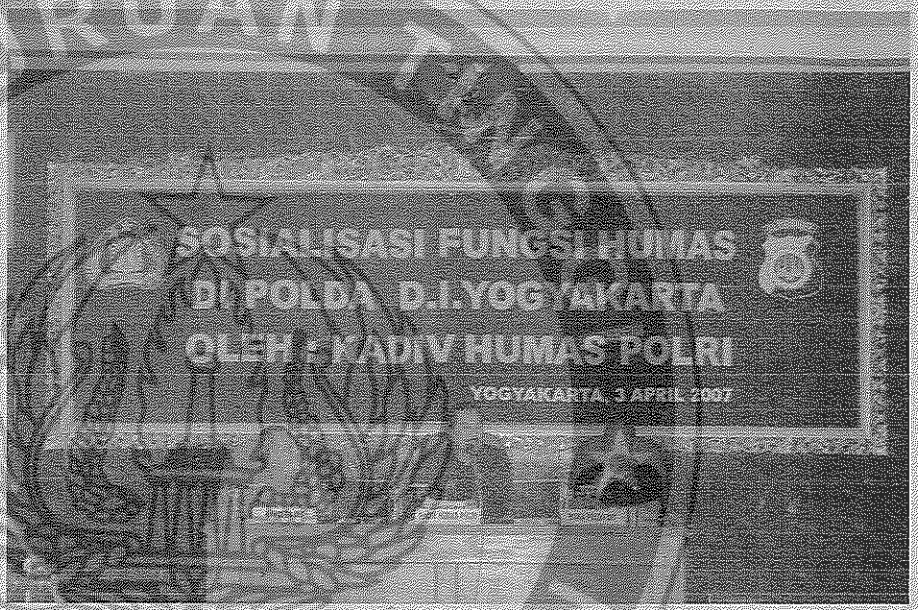

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Drs. Sisno Adiwinoto, MM, (tengah) saat memberikan penjelasan dalam Sosialisasi fungsi Humas 3 April 2007 di Polda D.I. Yogyakarta.

Dalam menghadapi media pers baik cetak maupun elektronik, diharapkan setiap Kasatker dan petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di bidang

pembinaan maupun operasional wajib :

a. Tidak menghindar dari wartawan tetapi wajib memberikan informasi/data sesuai fakta yang ada (jangan berasumsi), dan hanya sebatas pada apa, dimana, kapan, sedangkan informasi tentang siapa, mengapa dan bagaimana secara jelas, hanya diberikan pada saat pers release oleh pejabat Humas atau Kasatker.
b. Dalam memberikan informasi/keterangan kepada media secara transparan tetapi ada batas-batas tertentu yang tidak perlu dipublikasikan untuk umum, karena bersifat rahasia, terbatas dan bukan komsumsi publik.
c. Melaksanakan kemitraan dengan media massa yang mengarah kepada pembentukan opini positif dengan memberikan arahan bahwa tujuan pers/media adalah untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa dalam bernegara.

Sedangkan hal-hal yang tidak diperkenankan diliput oleh media antara lain :

a. Tidak memfasilitasi/mengijinkan reka ulang oleh media, karena reka ulang berdasarkan asumsi yang belum dijamin kebenarannya.
b. Tidak memberikan kesempatan kepada media untuk mewawancarai tersangka yang masih dalam proses penyidikan.
c. Tidak memberikan kesempatan kepada media untuk meliput di dalam kantor Polisi khususnya ruang pemeriksaan, ruang tahanan, ruang Barang Bukti dan memasuki TKP yang sudah dipasang Police Line.
d. Tidak memberikan kesempatan kepada media pada saat melakukan razia/penggerebekan dan tidak mempublikasikan tindakan kepolisian yang bersifat teknis.

Diharapkan seluruh anggota Polri di wilayah faham fungsi kehumasan dan melaksanakan tugas dengan benar sebagaimana hal tersebut di atas, maka di era kebebasan dan kemerdekaan Pers saat ini, kinerja dan citra Polri yang positif akan selalu mendominasi pemberitaan di seluruh media, baik media massa maupun elektronik.

Sosialisasi kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Kadivhumas polri ke beberapa Polda, merupakan hal yang baru dapat terealisasi, dimana Kadivhumas terdahulu, sebelumnya telah merencanakan tetapi belum terlaksana dan hasil daripada sosialisasi, adalah tanggapan yang sangat positif dari peserta dan mengharapkan sosialisasi seperti ini rutin dilaksanakan untuk memberikan masukan dan informasi terbaru khususnya kebijakan Kapolri kepada seluruh wilayah untuk dipahami, dicermati dan pada akhirnya dilaksanakan oleh seluruh wilayah dalam upaya menyamakan persepsi, menyamakan langkah dan menyamakan visi yang kesemuanya muaranya untuk menciptakan Polisi yang dicintai, yang selalu dekat dan yang selalu siap untuk dimintai perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum, serta dapat dipercaya oleh masyarakat sebagaimana tugas pokok Polri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Polri mendapatkan partisipasi dan dukungan masyarakat.***

Wujudkan Polri Sebagai Organisasi yang Dipercaya Masyarakat dalam Pemeliharaan Kamtibmas

Polri sebagai organisasi yang dipercaya masyarakat tentunya membutuhkan pemikiran dari pimpinan polri yang memiliki cakrawala pemikiran yang lebih luas dan mempunyai ketajaman dalam menganalisis berbagai masalah nasional, yang berdampak terhadap permasalahan Kamtibmas serta mampu memecahkannya secara strategis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pada era reformasi sekarang ini masyarakat sangat mendambakan terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta meningkatnya kinerja aparat yang profesional, taat hukum, adil, bijaksana dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan masyarakat yang demikian itu dapat dipahami, mengingat masyarakat mendambakan kehidupan yang lebih tentram dan damai. Tuntutan masyarakat tersebut juga mencerminkan besarnya keinginan rakyat untuk menjadikan Polri sebagai satu-satunya pelaksana tugas Polisional.

Memahami tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Polri, masyarakat secara umum cenderung tidak mau mendengar penjelasan tentang berbagai proses dan upaya yang telah dilakukan Polri. Masyarakat lebih menginginkan hasil yang nyata dan tentunya hasil kerja Polri tidak selalu dapat memuaskan semua masyarakat. Polri tidak perlu berkecil hati, tetapi justru harus dijadikan pemicu untuk mau membawa Polri menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan menegakkan hukum dalam memelihara Kamtibmas.

Keinginan tersebut tidak dapat terwujud begitu saja dan perlu upaya dan kemauan yang keras dari kita semua untuk mereformasi Polri menuju kearah yang lebih baik.

Suatu kebijakan tentang strategi Pemolisian Masyarakat agar masyarakat lebih berperan di dalam menciptakan kondisi Kamtibmas yang lebih baik. Dan ini semua harus dilakukan secara terencana, terprogram dan konsisten, sehingga apa yang bersama-sama kita harapkan dapat terwujud dengan baik.

Pada upacara penutupan Sespati Polri Dikreg ke-11 dan Sespim Polri Dikreg ke-43 tahun pendidikan 2006 Kapolri menekankan kepada para lulusan Sespati Polri dan Sespim Polri antara lain:

1. Memiliki cakrawala pemikiran yang lebih luas dan mempunyai ketajaman dalam menganalisis berbagai masalah nasional.
2. Mampu memecahkan permasalahan Kamtibmas secara strategis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia.
3. Mencermati tuntutan masyarakat dengan penuh pengabdian disertai keteguhan dan ketegasan dalam menjalankan tugas.
4. Strategi Pemolisian Masyarakat harus dilakukan secara terencana, terprogram dan konsisten agar masyarakat lebih berperan didalam menciptakan kondisi Kamtibmas, sehingga apa yang diharapkan bersama dapat terwujud dengan baik.***

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MEMBUKA KESEMPATAN
BAGI PEMUDA/PEMUDI WARGA NEGARA INDONESIA
UNTUK MENJADI PERWIRA POLRI MELALUI PENDIDIKAN

AKADEMI KEPOLISIAN

- PERSYARATAN :
  1. MEMILIKI IJAZAH SARJANA (S1, S2) DARI PERGURUAN TINGGI/FAKULTAS YANG TELAH TERAKREDITASI
  2. UMUR MAKSIMUM PADA SAAT PENDAFTARAN :
     A. UMUM
        1) S1 = 25 TAHUN DENGAN IPK 2,5
        2) S2 = 27 TAHUN DENGAN IPK 2,75
     B. ANGGOTA POLRI
        1) S1 = 28 TAHUN DENGAN IPK 2,5
        2) S2 = 28 TAHUN DENGAN IPK 2,75
  3. LULUS SELEKSI MELIPUTI :
     A. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI, KESEHATAN, PSIKOLOGI, AKADEMIK, DAN KEMAMPUAN JASMANI
     B. PESERTA DIDIK DITETAPKAN SEBANYAK 300 ORANG DENGAN PERINCIAN PRIA = 250 DAN WANITA = 50
- PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 18 APRIL S.D 25 MEI 2007
- PEMBUKAAN PENDIDIKAN TANGGAL 1 AGUSTUS 2007
- SETELAH DILANTIK MENJADI PERWIRA POLRI DIBERIKAN KOMPENSASI :
  1. S1 DENGAN PANGKAT INSPEKTUR DUA (IPDA) DIHITUNG TELAH MEMILIKI MASA KERJA PERWIRA 2 (DUA) TAHUN
  2. S2 DENGAN PANGKAT INSPEKTUR SATU (IPTU) DIHITUNG TELAH MEMILIKI MASA KERJA PERWIRA 3 (TIGA) TAHUN
- JENJANG KARIER :
  LULUSAN AKADEMI KEPOLISIAN SUMBER S1 DAN S2 DIPROYEKSIKAN MENJADI PIMPINAN POLRI MASA DEPAN DENGAN PENUGASAN SEBAGAI KEPALA KESATUAN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK, KAPOLRES, KAPOLWILTABES, KAPOLDA), DAN JABATAN-JABATAN STRATEGIS LAINNYA.
- PERSYARATAN SELENGKAPNYA DAPAT DIAMBIL DITEMPAT PENDAFTARAN :
  DI MARKAS KEPOLISIAN DAERAH (POLDA), POLWIL DAN POLRES TERTENTU DI SELURUH INDONESIA

http://www.polri.go.id

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. **PERSYARATAN UMUM :**
   a. Warga Negara Indonesia (Pria dan Wanita).
   b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
   d. Sehat jasmani dan rohani.
   e. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.
   f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
   g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.
   h. Pada saat diangkat menjadi anggota Polri dengan Pangkat Inspektur Dua (Ipda) bagi lulusan S1 diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun, sedangkan lulusan S2 dengan pangkat Inspektur Satu (Iptu) diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun, yang akan berpengaruh terhadap penghasilan dan kariernya, namun tidak mengurangi masa Ikatan Dinas Pertama (IDP) 10 Tahun.

2. **PERSYARATAN LAIN :**
   a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/S1 dengan IPK serendah-rendahnya 2,5 (dua koma lima) dan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk sarjana S2, dengan ketentuan :
      1) Berasal dari Perguruan Tinggi/Fakultas yang ter-akreditasi.
      2) Bagi Bintara Polri (pria dan wanita), yang telah selesai mengikuti magang dan pembulatan.
   b. Pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Taruna Akpol T.A. 2007, usia maksimal bagi :
      1) Umum :
         (a) S1 : 25 (dua puluh lima) tahun.
         (b) S2 : 27 (dua puluh tujuh) tahun.
      2) Anggota Polri :
         (a) S1 : 26 (dua puluh enam) tahun.
         (b) S2 : 28 (dua puluh delapan) tahun.
   c. Tinggi Badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) :
      1) Pria : 163 (seratus enam puluh tiga) cm
      2) Wanita : 160 (seratus enam puluh) cm
   d. Belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama dalam pendidikan pembentukan.
   e. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri (Masa Dinas Surut tidak diperhitungkan).
   f. Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
   g. Tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu Instansi lain.
   h. Bagi yang sudah bekerja sebagai Pegawai/Karyawan/Anggota Polri :
      1) Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Instansi/Satker yang bersangkutan.
      2) Bersedia diberhentikan dari status Pegawai/Karyawan/ Anggota Polri, bila diterima dan mengikuti pendidikan Pembentukan Taruna Akpol.
      3) Khusus Anggota Polri :
         a) Pada saat mendaftar telah selesai mengikuti magang dan pembulatan.
         b) Daftar Penilaian (Dapen) dengan nilai minimal 75 (tujuh puluh lima).
         c) Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari yang berwenang.
   i. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
      1) Pemeriksaan administrasi awal.
      2) Pemeriksaan Kesehatan Badan Tahap I dan Parade.
      3) Pemeriksaan Psikologi.
      4) Tes Potensi Akademik (TPA), Undang-Undang Kepolisian dan Bahasa Inggris.
      5) Pemeriksaan Kesehatan Tahap II.
      6) Pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani.
      7) Pantukhir.

Selapa Knowledge Center
Sebagai Upaya Polri Menuju Perubahan

Pada hari Senin, 18 Desember 2006, Kapolri Jenderal Sutanto meresmikan Selapa Knowledge Center (SKC) dengan fasilitas lainnya berupa Balai Selapa, Tribune Lapangan Sepak Bola, Balai Selapa, Monumen dan Taman Bacaan (Manca) di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) di Jl. Ciputat Raya No. 40 Jakarta Selatan.

SKC merupakan pusat aktivitas untuk mengolah ilmu pengetahuan antara personil Polri yang berada dilapangan sehingga dapat diolah dan menjadi pengetahuan. SKC juga dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mensosialisasikan ilmu pengetahuan mengenai polisi dan manajemen serta pengetahuan lainnya. SKC dirancang sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), sehingga mampu menampung data dan informasi mengenai seluruh agenda Kepolisian dan kegiatan lainnya yang mendukung. Seluruh sistem piranti ini disusun dalam bentuk simulasi, multimedia dalam skala miniature dari kondisi yang sesungguhnya, dengan fokus penggunaan bagi keperluan internal maupun eksternal Selapa Polri, demi kepentingan pendidikan dan pelatihan serta operasional tugas Kepolisian.

Gedung SKC dengan berbagai fasilitas.

SKC dilengkapi dengan digital library yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui www.selapa-polri.com. Dengan menjadi anggota perpustakaan, seluruh Polri dan masyarakat umum dapat mengakses lebih dari 10.000 buku baik berupa buku kepolisian, buku hukum, filsafat, agama, ekonomi, komunikasi, manajemen , dan masih banyak lagi. Dengan website ini diharapkan juga akan terbentuk komunitas antara Polri dan masyarakat umum sehingga mereka dapat berkomunikasi, bertukar pikiran dan saling memberi informasi.

SKC merupakan Knowledge Center pertama di kepolisian. SKC yang dimiliki Selapa ini memberikan informasi kepada publik mengenai informasi kepolisian tertentu yang merupakan bagian dari Polri menuju Center of Exellence yang mengendapkan kualitas dan transparasi. Misalnya, masyarakat dapat mengakses pola penanganan dan pola anatomi crime Kasus Bom Bali ataupun kasus-kasus Narkoba yang informasinya sudah diramu oleh tim analisis SKC dan disetujui pimpinan Polri. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui secara transparan semua yang terjadi tanpa harus menunggu statement resmi dari Kepolisian.

SKC juga dilengkapi dengan 14 PC dan 3 server yang dapat diakses publik. Selain itu, SKC juga mempunyai ruangan theater. Ruangan ini dikembangkan nantinya untuk video conference antara masyarakat, mabes Polri, polda-polda seluruh Indonesia dan juga Interpol, sehingga jika ada peristiwa di daerah-daerah tertentu, masyarakat dapat mengetahui langsung interaksinya dan kejadiannya melalui video conference.

Polri dan masyarakat juga dapat meminjam bukunya secara hard copy dengan langsung mendatangi SKC. Untuk Kenyamanan, SKC juga dilengkapi dengan executive lounge, tempat seminar dan diskusi, tempat bedah buku, dan kafetaria. Selain itu, Selapa bekerja sama dengan Manca, sebuah organisasi nirlaba mendirikan Taman Bacaan untuk anak. Selain anak-anak mendapatkan pendidikan melalui buku-buku dan educational toys, mereka juga mendapatkan simulasi dan buku-buku tentang bagaimana menangani kejahatan dan mengantisipasinya.***